

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sutisna
NIM : 182420118
Jenjang : Magister
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021” ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa bagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 15 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

Sutisna

NIM. 182420118

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PERANAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN UMUM DAN
ISLAM DI PROVINSI
BANTEN TAHUN 2019-2021**

Nama : Sutisna
NIM : 182420118
Jenjang : Magister (S2)
Program studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tanggal ujian : 31 Mei 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd).

Serang, 09 Juni 2022

Direktur



Prof. Dr. Ilzamudin Ma'mur, M.A
NIP. 19610829 199003 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul : **PERANAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN UMUM DAN
ISLAM DI PROVINSI
BANTEN TAHUN 2019-2021**

Nama : Sutisna
NIM : 182420118
Jenjang : Magister (S2)
Program studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tanggal ujian : 31 Mei 2022

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Anis Zohriah, M.M

Sekretaris : Dr. Fadila Oktaviana, M.Pd

Penguji I : Dr. Nana Suryapermana, M.Pd

Penguji II : Dr. Abdul Muin, M.M

Pembimbing I : Prof. Dr. H. E. Syarifudin, M.Pd

Pembimbing II : Dr. H. Anis Fauzi, M.Si

Diuji di Serang pada tanggal 31 Mei 2022

Waktu : 08.30 WIB-10.00 WIB

Hasil : 3,84 (Tiga Koma Delapan Empat)

Predikat : Dengan pujian



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
di Serang

Assalamu 'alaihiikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN UMUM DAN ISLAM DI PROVINSI
BANTEN TAHUN 2019-2021**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Sutisna
NIM	: 182420118
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti ujian tesis magister dalam rangka memperoleh gelar M.Pd (Magister Pendidikan).

Wassalamu 'alaihiikum wr.wb.

Serang, 18 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syarifudin, M.Pd
NIP.19650404199303 1 002

Dr. H. Anis Fauzi, M.Si
NIP. 19671028199802 1 001

ABSTRAK

Sutisna, NIM: 182420118, Judul Tesis: *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021*

Pasca era reformasi Pemerintah Indonesia menerapkan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintah daerah. Adapun urusan yang melekat pada pemerintah daerah diantaranya menyangkut pendidikan, dimana pendidikan jenjang menengah atas di bawah pemerintah provinsi. Atas kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Banten dituntut menghadirkan kebijakan pendidikan yang merata. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan masih adanya SMA dan SMK swasta di Provinsi Banten yang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan. Kondisi yang sama terjadi pada beberapa MA swasta di Provinsi Banten. Perwujudan kebijakan pembiayaan yang merata tidak dapat dilepaskan dari DPRD, karena sebagai lembaga legislatif daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan; (1) Mendeskripsikan peran DPRD dalam perencanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (2) Mendeskripsikan peran DPRD dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (3) Mendeskripsikan peranan DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Penelitian dilaksanakan di Komisi V DPRD Provinsi Banten sebagai AKD DPRD Provinsi Banten yang menaungi bidang pendidikan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa; (1) Peran DPRD Provinsi Banten dalam perencanaan pembiayaan pendidikan melekat dengan fungsi anggaran. Sesuai dengan tata tertib, DPRD berhak memberikan masukan apabila terdapat anggaran yang menurut DPRD menjadi prioritas untuk dilaksanakan. (2) Peran DPRD dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan lebih fokus kepada fungsi pengawasan. Sementara teknis pelaksanaan anggaran menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku KPA. (3) Pada

periode 2019-2021 Komisi V DPRD Provinsi Banten telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang pemerataan dukungan pembiayaan kepada SMA/SMK swasta. Namun, untuk dukungan pembiayaan kepada MA swasta belum maksimal karena terbatasnya kewenangan Komisi V DPRD Provinsi Banten untuk melaksanakan pengawasan.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Kebijakan Pembiayaan Pendidikan, dan Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan*

ABSTRACT

Sutisna, SRN: 182420118, Thesis Title: *The Role of the Regional House of Representatives in Evaluation of the Implementation of General and Islamic Education Policies in Banten Province in 2019-2021*

After the reform era, the Indonesian government implemented regional autonomy. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, defines regional autonomy as the rights, powers, and obligations of autonomous regions to administer and independently manage regional government affairs. The affairs attached to local governments include education, where upper secondary education is under the provincial government. With this authority, the Banten Provincial Government is required to present an equitable education policy. Based on the results of the researcher's search, it was found that there are still private high schools and vocational high schools in Banten Province that require educational financing assistance. The same condition occurs in several private Madrasah Aliyah in Banten Province. The realization of an equitable financing policy cannot be separated from the Regional People's Representative Council, because as a regional legislative body, the Regional People's Representative Council has legislative, budgetary and supervisory functions.

Based on this description, this research has three objectives; (1) Describe the role of the Regional House of Representatives in the planning of education financing policies for high school/vocational secondary schools and private Madrasah Aliyah in Banten Province. (2) Describe the role of the Regional House of Representatives in the implementation of education financing policies for high school/vocational secondary schools and private Madrasah Aliyah in Banten Province. (3) Describe the role of the Regional House of Representatives in evaluating the implementation of education financing policies for high school/vocational secondary schools and private Madrasah Aliyah in Banten Province in 2019-2021. The research was carried out at Commission V of the Banten Province Regional House of Representatives as the Banten Province Regional House of Representatives which oversees the education sector. The method used is descriptive qualitative with the type of case study research. Data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation.

Based on the results of the study it was concluded that; (1) The role of the Regional House of Representatives of Banten Province in

education financing planning is attached to the budget function. In accordance with the regulations, the Regional People's Representative Council has the right to provide input if there is a budget that according to the Regional People's Representative Council is a priority to be implemented. (2) The role of the Regional House of Representatives in the implementation of education financing is more focused on the supervisory function. Meanwhile, the technical implementation of the budget is under the authority of the Banten Province Education and Culture Office. (3) In the 2019-2021 period, Commission V of the Banten Province Regional House of Representatives has provided recommendations to the Banten Province Education and Culture Office regarding equitable distribution of financial support to private high school/vocational secondary schools. However, financial support for private Madrasah Aliyah has not been maximized due to the limited authority of Commission V of the Banten Province Regional House of Representatives to carry out supervision.

Keywords: Local Government, Education Financing Policy, and Evaluation of Education Financing Policy

نبذة مختصرة

سوتيسنا ، رقم تعريف الطالب: ١٨٢٤٢٠١١٨ ، عنوان الرسالة: دور مجلس النواب الإقليمي في تقييم تنفيذ سياسات التربية العامة والإسلامية في مقاطعة باننين في ٢٠١٩-٢٠٢١

بعد حقبة الإصلاح ، نفذت الحكومة الإندونيسية الحكم الذاتي الإقليمي. يُعرّف القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٤ بشأن الحكومة الإقليمية ، الحكم الذاتي الإقليمي على أنه حقوق وسلطات والتزامات مناطق الحكم الذاتي لإدارة شؤون الحكومة الإقليمية وإدارتها بشكل مستقل. تشمل الشؤون المرتبطة بالحكومات المحلية التعليم ، حيث يخضع التعليم الثانوي العالي لحكومة المقاطعة. وبهذه السلطة ، يُطلب من حكومة مقاطعة باننين تقديم سياسة تعليم عادلة. بناءً على نتائج بحث الباحث ، وجد أنه لا تزال هناك مدارس ثانوية خاصة ومدارس ثانوية مهنية في مقاطعة باننين تتطلب مساعدة تمويل تعليمية. نفس الحالة تحدث في عدة مدارس عليا خاصة في مقاطعة باننين. لا يمكن فصل تحقيق سياسة تمويل عادلة عن مجلس نواب الشعب الإقليمي ، لأن مجلس نواب الشعب الإقليمي ، بصفته هيئة تشريعية إقليمية ، له وظائف تشريعية ومالية ورقابية.

بناءً على هذا الوصف ، فإن هذا البحث له ثلاثة أهداف ؛ أولاً ، صف دور مجلس النواب الإقليمي في تخطيط سياسات تمويل التعليم للمدارس الثانوية / المدارس الثانوية المهنية والمدارس العليا الخاصة في مقاطعة باننين. ثانياً ، صف دور مجلس النواب الإقليمي في تنفيذ سياسات تمويل التعليم للمدارس الثانوية / المدارس الثانوية المهنية والمدارس العليا الخاصة في مقاطعة باننين. ثالثاً ، صف دور مجلس النواب الإقليمي في تقييم تنفيذ سياسات تمويل التعليم للمدارس الثانوية / المدارس الثانوية المهنية والمدرسة العليا الخاصة في مقاطعة باننين في ٢٠١٩-٢٠٢١. تم إجراء البحث في اللجنة الخامسة لمجلس النواب الإقليمي لمقاطعة باننين الذي يشرف على قطاع التعليم. الطريقة المستخدمة هي الطريقة الوصفية النوعية مع نوع دراسة الحالة البحثية. تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وتوثيق وملاحظة.

بناءً على نتائج الدراسة تم الاستنتاج أن: أولاً ، يرتبط دور مجلس النواب الإقليمي لمقاطعة باننين في تخطيط تمويل التعليم بوظيفة الميزانية. وفقاً للوائح ، يحق لمجلس نواب الشعب الإقليمي تقديم مدخلات إذا كانت هناك ميزانية وفقاً لمجلس نواب الشعب الإقليمي تعتبر من الأولويات الواجب تنفيذها. ثانياً ، يتركز دور مجلس النواب الإقليمي في تنفيذ تمويل التعليم بشكل أكبر على الوظيفة الإشرافية. وفي الوقت نفسه ، يخضع التنفيذ الفني للميزانية لسلطة مكتب التعليم والثقافة في مقاطعة باننين. ثالثاً ، في الفترة ٢٠١٩-٢٠٢١ ، قدمت اللجنة الخامسة لمجلس النواب الإقليمي لمقاطعة باننين توصيات إلى مكتب التعليم والثقافة في مقاطعة باننين بشأن التوزيع العادل للدعم المالي للمدارس الثانوية الخاصة / المدارس الثانوية المهنية. ومع ذلك ، لم يتم تعظيم الدعم المالي للمدرسة العليا الخاصة بسبب السلطة المحدودة للجنة الخامسة التابعة لمجلس النواب الإقليمي لمقاطعة باننين للقيام بالإشراف.

الكلمات المفتاحية: الحكومة المحلية ، سياسة تمويل التعليم ، تقييم سياسة تمويل التعليم

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New arabic 12*, dengan cara sebagai berikut :

ā	= tekan a dan tekan shift + titik
Ā	= tekan A dan tekan shift + koma
ī	= tekan I dan tekan shift + titik
Ī	= tekan I dan tekan shift + koma
ū	= tekan u dan tekan shift + koma
Ū	= tekan U dan tekan shift + titik
ḥ	= tekan h dan tekan shift + kurung kurawal kanan
Ḥ	= tekan H dan tekan shift + kurung kurawal kiri
ṣ	= tekan s dan tekan shift + kurung kurawal kanan
Ṣ	= tekan S dan tekan shift + kurung kurawal kiri
š	= tekan s dan tekan garis miring
Š	= tekan S dan tekan shift + garis miring
ḍ	= tekan d dan tekan shift + kurung kurawal kanan
Ḍ	= tekan D dan tekan shift + kurung kurawal kiri
ṭ	= tekan t dan tekan shift + kurawal kanan
Ṭ	= tekan T dan tekan shift + kurawal kiri

Ẓ = tekan z dan tekan garis miring

Ẓ = tekan Z dan tekan shift + kurung kurawal kiri

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B / b	Be
ت	ta'	T / t	Te
ث	tsa'	Ṣ / Ṣ	tse (s titik di atas)
ج	Jim	J / j	Je
ح	ha'	Ḥ / ḥ	ha (h dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh / kh	kha (gabungan k dan h)
د	Dal	Ḍ / ḍ	De
ذ	zal'	Z / z	zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R / r	Er
ز	Zai	Ẓ / Ẓ	Zet
س	Sin	Ṣ / Ṣ	Es
ش	syin	Sy / sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ / ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ / ḍ	de (dengan titik atau garis di bawah)
ط	ta'	Ṭ / ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z / z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	ge (gabungan dan h)
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Konson Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

هية	Ditulis	<i>Hibah</i>
خزنة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Keterangan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karanah al- auliya</i>
----------------	---------	-------------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathhah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
-------	--------	---------	---

◌ْ			
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
خاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	<i>yas'a</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furudu</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulu</i>

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada Bapak Emed (ayah), Ibu Sutini (ibu), Ana Safitri (istri), dan Herlan (adik). Mereka adalah orang-orang yang saya cintai dan banggakan, dukungan mereka kepada saya sangat berarti untuk menyelesaikan masa studi pada Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021”.

Tesis ini memberikan gambaran tentang peran DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Penulis menyajikan ketiga aspek tersebut dari mulai teoritis sampai penelitian lapangan tentang kinerja yang telah dilakukan DPRD Provinsi Banten dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini bisa selesai atas bantuan dan dukungan sejumlah pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN SMH Banten Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd;
2. Direktur Program Pascasarjana UIN SMH Banten Bapak Prof. Dr. Ilzamuddin Ma'mur, M.A;
3. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam sekaligus pembimbing tesis Bapak Dr. H. Anis Fauzi, M.Si;

4. Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Dr. Hj. Anis Zohriah, M.Si;
5. Dosen Pembimbing tesis sekaligus Ketua Program Studi Program Doktoral UIN SMH Banten bapak Prof. Dr. H. Encep Syarifudin, M.Pd;
6. Seluruh Staf Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 Bapak Andra Soni;
8. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Banten Bapak Yudi Budi Wibowo;
9. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 Bapak H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc;
10. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 Bapak Ade Hidayat, S.Kom;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Dr. H. Tabrani, M.Pd;
12. Ketua Kelompok Kerja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Bapak Deni Saprowi;
13. Pembina Suwaib Amiruddin Foundation Bapak Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si;
14. Senior HMI Kanda Agus Aan Hermawan, M. Sc.

Akhir kata penulis berharap tesis dapat memberikan manfaat yang dapat menyumbang pemikiran tentang kebijakan pendidikan di Provinsi Banten. Penulis sangat berharap adanya

kritik yang membangun atas tesis ini untuk bahan perbaikan
ke depan.

Serang, 10 Mei 2022

Sutisna

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan	12
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Kerangka Teori	23
H. Metode Penelitian	36
I. Sistematika Pembahasan	42
BAB II KAJIAN TEORI	43
A. Manajemen Pendidikan	43
1. Fungsi Manajemen.....	43

2. Prinsip Manajemen Pendidikan.....	46
B. Kebijakan Pendidikan	50
1. Konsep Kebijakan Publik.....	50
2. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah	57
3. Kebijakan Pembiayaan Pendidikan.....	66
C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan	75
1. Model Evaluasi Kebijakan	81
2. Peran DPRD	86
D. Jenjang Pendidikan Menengah Atas	92
1. Tujuan dan Arah Kebijakan	92
2. Standar Nasional Pendidikan	94
BAB III METODE PENELITIAN	114
A. Tujuan Penelitian	114
B. Tempat dan Waktu Penelitian	115
C. Metode Penelitian.....	116
D. Langkah-langkah Penelitian	119
E. Sumber Data	120
F. Teknis Pengumpulan Data	121
G. Teknik Analisis Data.....	127
H. Uji Keabsahan Data	130
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	134
A. Gambaran Umum DPRD Provinsi Banten.....	134
B. Paparan Hasil Penelitian	140
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	162
BAB V PENUTUP.....	174

A. Simpulan	174
B. Implikasi.....	177
C. Saran.....	178
BIBLIOGRAFI.....	177
LAMPIRAN.....	188
BIOGRAFI PENULIS	189